JUMPER
Jurnal Manajemen dan Pemasaran
ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

PENGUATAN ETIKA PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO

A.Hadijah Sulfiyani A[1], Nasir[2*]
[1]Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
[2]Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: [1]ahadijahsulfiyani@unm.ac.id, [2*]nasir@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks reformasi birokrasi, etika pemerintahan menjadi landasan normatif dan operasional bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penguatan etika pemerintahan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja ASN pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pimpinan dan ASN yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan etika pemerintahan dilaksanakan melalui penerapan kode etik, pembinaan disiplin, pengawasan internal, serta keteladanan pimpinan. Penguatan tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan disiplin kerja, tanggung jawab, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi. Namun demikian, internalisasi nilai etika belum merata dan integrasi indikator perilaku etis dalam sistem penilaian kinerja masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan pembinaan berbasis nilai, integrasi aspek etika dalam evaluasi kinerja ASN, serta peningkatan keteladanan pimpinan guna membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata kunci: Etika pemerintahan; kinerja ASN; profesionalisme; birokrasi daerah.

Abstract

This research is motivated by the importance of strengthening government ethics in realizing a professional and integrity bureaucracy to improve the performance of the State Civil Apparatus (ASN). In the context of bureaucratic reform, government ethics are the normative and operational basis for civil servants in carrying out their duties and functions of public services. This study aims to analyze forms of strengthening government ethics and their contribution to improving the performance of ASN at the Palopo City Regional Secretariat. The research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies of leaders and civil servants who were selected purposively. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that strengthening government ethics is carried out through the application of the code of ethics, discipline coaching, internal supervision, and leadership examples. The strengthening contributes positively to improving work discipline, responsibility, transparency, and quality of administrative services. However, the internalization of ethical values is not even and the integration of ethical behavior indicators in the performance appraisal system still needs to be improved. Therefore, it is recommended to strengthen value-based coaching, integrate ethical aspects in the performance evaluation of ASN, and improve leadership examples to build an organizational culture with integrity and oriented towards public services.

Keywords: *Government ethics; ASN performance; professionalism; regional bureaucracy.*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berintegritas merupakan prasyarat

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep *good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan (Putra et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, etika pemerintahan menjadi fondasi normatif yang mengarahkan perilaku aparatur negara agar selaras dengan nilai-nilai kepentingan publik. Etika tidak lagi dipandang sekadar sebagai norma moral individual, melainkan sebagai sistem nilai institusional yang mengikat seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik secara profesional dan bertanggung jawab. Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh integritas dan etika aparatur dalam melaksanakan kewenangannya, karena integritas menjadi sumber utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketika etika pemerintahan diabaikan, konsekuensi yang muncul tidak hanya berupa pelanggaran disiplin administratif, tetapi juga berpotensi melahirkan praktik maladministrasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan koruptif yang merugikan negara dan masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan publik akan mengalami penurunan kualitas pelayanan, ketidakpastian prosedur, serta rendahnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya legitimasi institusi publik. Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan menjadi isu strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dalam upaya membangun birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah menempatkan peningkatan profesionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agenda prioritas nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN harus berpegang pada nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa etika pemerintahan telah memiliki landasan hukum yang kuat. Namun demikian, tantangan implementasi di tingkat daerah masih cukup kompleks. Prasojo & Kurniawan (2020) mengemukakan bahwa permasalahan birokrasi daerah umumnya berkaitan dengan lemahnya budaya kerja berbasis integritas, rendahnya konsistensi penegakan kode etik, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma formal dan praktik empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja ASN sebagai aktor utama birokrasi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan waktu, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap standar prosedur. Mangkunegara (2020) menjelaskan bahwa kinerja aparatur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi, motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, serta sistem nilai dan etika yang berkembang dalam organisasi. Dengan demikian, etika pemerintahan memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya kerja yang produktif dan profesional. Tanpa penguatan etika secara sistematis, perilaku kerja aparatur berpotensi menyimpang dari prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik.

Penelitian Hasdi, Supardi, & Pangga (2025) menunjukkan bahwa penguatan etika organisasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan disiplin dan produktivitas pegawai sektor publik. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa internalisasi nilai etika mampu mendorong aparatur untuk bekerja lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Hal serupa dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2019) dalam paradigma *New Public Service* yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam pelayanan pemerintahan. Artinya, etika

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan faktor determinan dalam pembentukan budaya kinerja organisasi publik.

Pada tataran pemerintah daerah, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator perangkat daerah dan perumus kebijakan administratif yang mendukung kepala daerah. Posisi ini menempatkan Sekretariat Daerah sebagai pusat pengendalian manajemen pemerintahan yang menuntut profesionalisme tinggi. Sekretariat Daerah Kota Palopo sebagai unsur staf pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan sinkronisasi kebijakan, efektivitas administrasi, serta kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, penguatan etika pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan setiap aparatur bekerja sesuai dengan prinsip integritas, netralitas, dan akuntabilitas. Pardede & Mustam (2021) menyatakan bahwa lemahnya komitmen terhadap etika kerja akan berdampak pada rendahnya efektivitas organisasi dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif. Hitchner (2020) menekankan bahwa birokrasi modern harus berorientasi pada hasil (*result-oriented government*) serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menilai kinerja aparatur pemerintah. Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam membangun kepercayaan publik. Alternatif solusi seperti peningkatan kompetensi teknis, reformasi sistem remunerasi, dan digitalisasi pelayanan memang penting, namun tanpa fondasi etika yang kuat, upaya tersebut tidak akan memberikan dampak berkelanjutan (Elazhari & Siregar, 2025; Nasir, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu juga memperkuat pentingnya hubungan antara etika pemerintahan dan kinerja aparatur. Pasaribu, Briando, & Imigrasi (2019) menyimpulkan bahwa internalisasi kode etik secara berkelanjutan mampu meningkatkan tanggung jawab dan komitmen kerja pegawai pemerintah daerah. Meme & Subardjo (2020) menemukan bahwa organisasi publik dengan sistem pengawasan etika yang kuat menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang lemah dalam aspek tersebut. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penguatan etika pemerintahan bukan hanya tuntutan normatif, tetapi juga kebutuhan strategis dalam meningkatkan kinerja ASN secara nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana penguatan etika pemerintahan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penguatan etika pemerintahan yang diterapkan serta sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja ASN. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik, khususnya terkait integrasi antara etika pemerintahan dan manajemen kinerja aparatur. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam merancang strategi penguatan etika dan peningkatan kinerja ASN secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, penguatan etika pemerintahan dimaknai sebagai upaya sistematis dan terencana organisasi dalam menanamkan, menginternalisasikan, serta menegakkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, tanggung jawab, netralitas, dan profesionalisme melalui mekanisme kode etik, pembinaan berkelanjutan, pengawasan internal, sistem sanksi dan penghargaan, serta keteladanan pimpinan. Sementara itu, kinerja ASN dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil kerja yang diukur berdasarkan

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan standar operasional prosedur sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting dalam menjawab kebutuhan akan birokrasi daerah yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penguatan etika pemerintahan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan perilaku organisasi secara kontekstual dan holistik dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Palopo pada bulan November 2025 hingga Januari 2026, dengan sasaran penelitian adalah implementasi penguatan etika pemerintahan dan dampaknya terhadap kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan publik. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penerapan etika pemerintahan, meliputi Sekretaris Daerah, kepala bagian, pejabat struktural, serta beberapa ASN sebagai informan pendukung.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data, reduksi data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan internal, kode etik ASN, laporan kinerja, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi sebagai alat bantu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik penguatan etika pemerintahan.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Huberman (2020). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penguatan etika dan kinerja ASN, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari temuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan konfirmasi kepada informan (*member check*) guna memastikan akurasi dan kredibilitas data. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai penguatan etika pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kinerja ASN pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan etika pemerintahan pada

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

Sekretariat Daerah Kota Palopo telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme formal dan informal yang terintegrasi dalam sistem manajemen kepegawaian. Secara formal, penguatan etika diwujudkan melalui penerapan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan apel disiplin, penandatanganan pakta integritas, serta pembinaan rutin yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan internal melalui atasan langsung dan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Secara informal, penguatan etika juga berlangsung melalui budaya kerja sehari-hari, komunikasi interpersonal, serta keteladanan pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pola ini menunjukkan bahwa penguatan etika tidak hanya bersifat normatif-administratif, tetapi juga menyentuh aspek kultural organisasi.

Secara normatif, seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palopo telah memahami keberadaan kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi nilai-nilai dasar ASN, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang secara berkala disampaikan dalam forum internal. Sebagian besar informan menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari standar perilaku kerja yang diharapkan organisasi. Namun demikian, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa tingkat internalisasi nilai etika masih bervariasi antarbagian. Unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan dengan gaya kepemimpinan partisipatif dan komunikatif cenderung memiliki tingkat pemahaman dan penerapan etika yang lebih baik dibandingkan unit dengan pola kepemimpinan yang administratif dan kurang interaktif. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kepemimpinan berperan signifikan dalam mentransformasikan norma etika menjadi budaya kerja nyata.

Dalam aspek disiplin dan tanggung jawab kerja, sebagian besar informan mengakui bahwa penerapan etika pemerintahan telah mendorong peningkatan kesadaran pegawai dalam menaati jam kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga sikap profesional dalam pelayanan administrasi. Berdasarkan hasil observasi, terjadi peningkatan ketertiban administrasi, kerapian dokumentasi, serta koordinasi lintas bagian yang lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. ASN terlihat lebih berhati-hati dalam menyusun laporan, memproses dokumen, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun perangkat daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa etika pemerintahan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang membentuk perilaku kerja aparatur. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hasdi et al. (2025) yang menyatakan bahwa penguatan etika organisasi memiliki hubungan positif dengan peningkatan disiplin dan produktivitas pegawai sektor publik. Dengan adanya penguatan etika, aparatur tidak hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga terdorong oleh kesadaran moral untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi penguatan etika pemerintahan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya sistem evaluasi berbasis etika yang terintegrasi dalam penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja masih lebih menekankan pada capaian kuantitatif dan administratif dibandingkan indikator perilaku etis secara komprehensif. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika cenderung bersifat administratif dan reaktif, belum sepenuhnya diarahkan pada pembinaan berkelanjutan yang menyentuh aspek kesadaran dan komitmen moral aparatur. Selain itu, masih terdapat sebagian pegawai yang memandang kode etik sebagai formalitas yang harus dipatuhi secara administratif, bukan sebagai nilai yang harus diinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan adanya

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

kesenjangan antara regulasi dan praktik, sebagaimana dikemukakan oleh Prasojo & Kurniawan (2020) bahwa tantangan birokrasi daerah terletak pada lemahnya internalisasi integritas dalam budaya organisasi.

Dari sisi kinerja organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan etika pemerintahan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan koordinasi internal. Beberapa informan menyampaikan bahwa adanya penegasan nilai integritas dan akuntabilitas mendorong pegawai untuk lebih transparan dalam penyusunan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta lebih responsif terhadap arahan pimpinan. Peningkatan tersebut terlihat pada ketepatan waktu penyelesaian dokumen, berkurangnya kesalahan administratif, serta meningkatnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Selain itu, komunikasi antarbagian menjadi lebih terbuka dan kolaboratif, yang pada akhirnya mempercepat proses penyelesaian tugas organisasi. Temuan ini mendukung pandangan Mangkunegara (2020) bahwa sistem nilai dan etika kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja aparatur selain kompetensi dan motivasi kerja.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penguatan etika pemerintahan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kepemimpinan yang konsisten dan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Keteladanan pimpinan terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun budaya etis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palopo. ASN cenderung meniru pola perilaku atasan, terutama dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Pimpinan yang menunjukkan komitmen terhadap nilai etika, seperti transparansi dan keadilan, mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan saling menghargai. Hal ini sejalan dengan teori *New Public Service* yang menekankan pentingnya kepemimpinan etis dan orientasi pada nilai publik dalam organisasi pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2019). Dengan demikian, keberhasilan penguatan etika sangat bergantung pada komitmen pimpinan dalam menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika pemerintahan memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Palopo, terutama dalam aspek disiplin kerja, tanggung jawab, transparansi, dan kualitas pelayanan administrasi. Namun demikian, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui integrasi indikator perilaku etis dalam sistem penilaian kinerja, peningkatan pembinaan berbasis nilai, serta pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, penguatan etika pemerintahan tidak hanya menjadi kewajiban normatif yang bersifat formal, tetapi benar-benar berkembang menjadi budaya organisasi yang mengakar dan mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penguatan etika pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Penguatan etika telah dilaksanakan melalui mekanisme formal seperti penerapan kode etik dan kode perilaku ASN, pembinaan disiplin, pengawasan internal, serta penandatanganan pakta integritas, maupun melalui mekanisme informal seperti keteladanan pimpinan dan pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada nilai integritas dan tanggung jawab. Secara umum, ASN

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

telah memahami norma dan nilai etika pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, dan hal tersebut berdampak pada meningkatnya disiplin kerja, tanggung jawab, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan etika berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan koordinasi internal organisasi. ASN cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, lebih akuntabel dalam penyusunan laporan, serta lebih responsif terhadap tugas dan arahan pimpinan. Namun demikian, implementasi penguatan etika pemerintahan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal internalisasi nilai etika yang belum merata di setiap unit kerja serta belum optimalnya integrasi indikator perilaku etis dalam sistem evaluasi kinerja. Penegakan sanksi yang masih dominan bersifat administratif juga menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar Sekretariat Daerah Kota Palopo memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi berbasis etika dengan mengintegrasikan indikator perilaku etis dalam penilaian kinerja ASN. Selain itu, diperlukan program pembinaan dan pelatihan etika secara berkala yang tidak hanya menekankan aspek regulatif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan komitmen profesional aparatur. Keteladanan pimpinan perlu terus ditingkatkan sebagai contoh konkret dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Dengan langkah-langkah tersebut, penguatan etika pemerintahan diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Referensi

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2019). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.

Elazhari, E., & Siregar, B. (2025). Reformasi birokrasi dan tantangan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal: Analisis kritis terhadap implementasi sistem merit. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, *5*(2), 138–149.

Hasdi, H., Supardi, S., & Pangga, W. (2025). Pengaruh Manajemen Penguatan Program, Training, dan SDM Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Islamic Value. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *19*(1), 180–195.

Hitchner, E. (2020). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. *National Productivity Review*, *11*(3), 425–431.

Huberman, A. (2020). Qualitative data analysis a methods sourcebook.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2020). Manajemen sumber daya manusia perusahaan.

Meme, M. E., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *8*(10).

Nasir, N. (2025). Human Resource Management Strategy in Improving Public Service Performance at the Population and Civil Registration Office of Gowa Regency. *Journal Business Inovation, Accounting and Management*, *1*(2), 31–41.

ISSN : 2985 – 492X
Vol 5 , No 1, Tahun 2026
Halaman : 7- 14
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jumper

Pardede, A. C., & Mustam, M. (2021). Manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil dalam rangka reformasi birokrasi di kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *6*(4), 122–140.

Pasaribu, P. Y., Briando, B., & Imigrasi, P. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(2), 245–264.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi birokrasi dan good governance di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*.

Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(02), 1239–1251.